

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, Z. d. (2006.). *Pengertian, Sifat dan Hakikat Hukum Perburuhan dalam Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
- Devi, R. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan*. . Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Edi Harapan, T. K. (2024). *Edi Harapan, Teman Koesmono, Ida Ayu KaPengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkelanjutan: Strategi untuk Meningkatkan Keterampilan dan Kompetensi dalam Organisasi*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.
- Hartatiyanto, G. (2019.). *Analisis Yuridis Perjanjian Asuransi dan Asuransi Sosial pada Pelaksanaan Program Kartu Jakarta Sehat Sebagai Suatu Jaminan Sosial*. . Banyumas: CV. Pena Persada.
- Husni, L. (2010.). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Nurrohmi Ambar Tasriastuti, F. T. (2019.). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang.: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Putri, A. E. (2016.). *Buku Tanya-Jawab Seputar Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Ketenagakerjaan (SJSN-TK)*. . Jakarta: Tim Koordinasi Komunikasi Publik Terintegrasi Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.

- Rochmad, B. &. (1955). *Hukum Perburuhan di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Sastrohadiwiryo, S. (2005.). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*:. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (1986.). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soemitro, R. H. (1990.). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soepomo, I. (1997.). *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan.
- Soepomo, I. (Edisi Revisi 2003.). *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Sutedi, A. (2009.). *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Wisnu, D. (2012.). *Politik Sistem Jaminan Sosial*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Zulkarnaen. (2021.). *Hubungan Ketenagakerjaan Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)*. Bandung: Pustaka Setia.

Jurnal Artikel

- Agnesia, Monika, dan Nikma Yucha. “Pengaruh Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Jaminan Sosial terhadap Kinerja Kerja Karyawan.” *Indonesian Economic Journal* 4, no. 2 (2022).

Alhamid, Thalha. "Instrumen Pengumpulan Data Kualitatif." Februari 11, 2019.

Dungga, W. A., dan A. H. Tome. "Identifikasi Faktor Penghambat Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo." *Jambura Law Review* 1, no. 1 (2019): 1–21.

Farida, Elfia. "Kewajiban Negara Indonesia terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 14, no. 2 (November 2021).

Fauzi, Syifa, dan Bambang Shergi Laksmono. "Implementasi Kebijakan Triple Skilling dalam Membangun Sumber Daya Manusia Terampil dan Produktif (Studi Kasus: Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bekasi." *Jurnal Pembangunan Manusia* 2, no. 2 (2021): 4.

Fuadhy, Nabhan Sofwatul, Zulkarnaen, dan Utang Rosidin. "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan oleh BPJS di Kabupaten Ciamis." *Jurnal Varia Hukum* 3, no. 2 (Juli 2021).

Hennigusnia, Ardhian Kurniawati. "Tinjauan Konstitusional terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial." *Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 16 No. 2*, Edisi Juli – Desember 2021. ISSN: 1907 – 6096.

Indrawati, dan Tumiar Rohana Simanjuntak. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusahaan yang Lalai Mendaftarkan Pekerjanya sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan." *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (2019): 52.

Islamy, Muh. Irfan. Definisi dan Makna Kebijakan Publik. *Jakarta: Universitas Terbuka*.

Jalil, M. Abd. “Solusi Mengatasi Pengangguran di Indonesia.” *Kultura* 18, no. 2 (2017): 6887–6888.

Lazuardi, Majid, dan Hariyo Sulistianoro. “Konsekuensi Hukum Terhadap Perusahaan yang Belum Mendaftarkan Tenaga Kerjanya pada Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (Studi di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rungkut).” *Jurnal Revolusi Indonesia* 1, no. 7 (2021): 657.

Lismanto. “Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2 (2020): 420.

Lubis, Muhammad Ansori, Ria Sinta Dhevi, and Muhammad Yasid. “Penegakan Hukum Terhadap Aparat Sipil Negara yang Melakukan Pelanggaran Hukum dalam Mewujudkan Good Governance.” *Jurnal Darma Agung* 28, no. 2 (Agustus 2, 2020): 269–285.

Lutfiah, Damayanti Maharani. “TEORI PRODUKSI.” 2020.

Mardiyah, Farah Diva Nabila, Alfina Robiatul Adawiyah, Ahmad Faishol Efendi, and Ach. Baidlowi Asy’ari. “Dampak Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Perencanaan dan Pengembangan Karir.” *Neraca Manajemen, Ekonomi* 10, no. 5 (2024).

- Mustafa, Dewi Wahyuni. “Efektivitas Peranan Mediator dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial.” *Journal of Law 1*, no. 2 (2022): 31.
- Putra, Marsudi Dedi. “Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila.” *LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah 23*. (2021): 139.
- Putri, Fitri Apriliawati, Abdul Rachmad Budiono, dan Ratih Dheviana Puru HT. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Kewajiban Perusahaan untuk Mengikutsertakan Pekerja dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (Studi di Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo). Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.
- Ragiliawan, Zelius, dan Beni Teguh Gunawan. “Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam Perspektif Belanja Negara.” *Jurnal Ketenagakerjaan 15*, no. 1 (2021): 54.
- Soleh, Ahmad. “Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos 6*, no. 2 (Juli 2017).
- Sonhaji. “Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Kesalahan Berat Pekerja.” *Administrative Law & Governance Journal 2*, no. 1 (Maret 2019): 60–78.
- Suhandi, “Fungsi Pengaturan dan Manfaat Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Pekerja.” *Jurnal Perspektif 8*, no. 4 (2003): 325–326.
- Suhartoyo. “Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional.” *Diponegoro Law Jurnal 2*, no. 2 (2019): 328.

- Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–2478.
- Wibowo, Rudi Febrianto, dan Ratna Herawati. “Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2011): 110.
- Wijaya, Agus, Solechan, and Suhartoyo. “Analisis Yuridis Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Setelah Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.” *Diponegoro Law Jurnal* 11, no. 2 (2022): 2.
- Zaelani. “Komitmen Pemerintah dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional.” *Jurnal Legislasi Nasional*, Vol. 9 No. 2 (Juli 2012)

Karangan Dalam Bulletin

- “Deflasi Lima Bulan Berturut-turut, Tanda Masyarakat Kelas Pekerja Sudah Tidak Punya Uang Lagi untuk Berbelanja.” BBC News Indonesia. Diakses 1 Desember 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9wkd982krvo>.
- “Kumpulan Data.” Satudata Kemenaker, <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1921>.
- “Pekerja Tekstil yang Dipecat Tak Dapat Jaminan Kehilangan Pekerjaan, DPR Minta BPJS Telusuri.” Liputan 6. Diakses 2 Februari 2025.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5633656/pekerja-tekstil-yang-dipecat-tak-dapat-jaminan-kehilangan-pekerjaan-dpr-minta-bpjs-telusuri?page=4>.

“Pengertian Media Sosial.” Gramedia Blog,

https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-media-sosial/?srsltid=AfmBOopl02_dbpBAoeOmRqxvzf3nvggiyoOsFuCQJjHYaJtKksSVcCZw.

“9 Aspek Keuangan Negara dalam UU Cipta Kerja Terkait Peningkatan

Investasi.” Saputra, Toto Hari, *Opini Kemenkeu*. 2021.

<https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/9-aspek-keuangan-negara-dalam-uu-cipta-kerja-terkait-peningkatan-investasi>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembayaran Manfaat Uang Tunai dan Manfaat Pelatihan Kerja Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

LAMPIRAN

1. Lampiran 1: Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suroyo
Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 76918201 Fax (024) 76918206
Laman: www.fh.undip.ac.id, Pos-el: [fh\[at\]live.undip.ac.id](mailto:fh[at]live.undip.ac.id)

Nomor : 773/UN7.F1/AK/II/2025
Lamp. :
Hal : Permohonan Ijin Pra Riset

27 FEB 2025

Yth. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Tengah Dan Daerah
Istimewa Yogyakarta
Jl. Pemuda No. 130 Semarang
Jawa Tengah 50132

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka pembuatan Proposal Penulisan Hukum (Skripsi) sebagai tugas akhir mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan proposal perlu melakukan penelitian awal (Pra-Riset).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan Pra-Riset dilingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

nama : Fadhil Akmal Diastyono
NIM : 11000121140532
semester : 8
alamat : Jl. Timoho III No 10 Semarang, Jawa Tengah
nomor HP : 081221984467

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Dekan,

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET/02/032025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfian Setyo Nugroho
NIP : 19820389 200904 1 001
Alamat : JL. Pemuda No. 130 Semarang

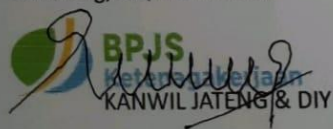
Dengan ini menerangkan bahwa :

No.	Nama	NIM	Fakultas
1	Fadhil Akmal Diastyono	11000121140532	Hukum

Telah melaksanakan penelitian bulan Maret 2025 di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jateng & DIY

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 22 Maret 2025


BPJS
Ketenagakerjaan
KANWIL JATENG & DIY

Alfian Setyo Nugroho